

KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Pembinaan di Istiqlal

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengharapkan prajuritnya bisa lebih andal setelah menjalani program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kader pembinaan mental di Masjid Istiqlal, Jakarta.

"Batch kedua pembinaan mental para personel TNI AD merupakan upaya peningkatan keimanan serta menghasilkan SDM yang andal untuk masa depan," ujar Andika, Selasa (9/3).

Adapun materi yang diberikan dalam program ini adalah pembinaan mental. Tetapi, materi-materi sudah dimodifikasi oleh pengajar dengan melihat evaluasi pada batch pertama.

"Pada kegiatan kader pembinaan mental TNI AD 2021 ini merupakan batch kedua yang di mana pada batch pertama sudah melahirkan para prajurit TNI AD dengan jiwa ulama yang mampu membawakan serta menyebarkan nilai Islam baik pada satuannya hingga masyarakat," terang Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Umar menjelaskan, modifikasi materi pada batch kedua bertujuan untuk menghasilkan SDM andal dan dapat menghadapi perkembangan masa depan. Ia juga berharap peserta gelombang kedua ini mampu lebih baik lagi dan dapat menghasilkan sesuai harapan dari rencana program tersebut. **mei**

Haris Masih Merasa Ketum Minta KPK Awasi Anggaran Kongres Ke-16 KNPI

JAKARTA (IM) - Haris Pertama klaim bahwa dirinya masih sebagai Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ia tidak mengaku pemberhentian dirinya sebagai Ketum dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3) lalu.

Selain mengklaim masih sebagai ketua umum, Haris juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam kongres ke-16 KNPI.

Dalam akun Twitternya, Haris membagikan beberapa unggahan di antaranya berisi bahwa dia masih Ketua Umum KNPI sesuai yang sah sesuai Kongres KNPI ke-XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020 dan ada yang mencoba memecah belah pemuda Indonesia. Termasuk akan adanya kongres KNPI ke 16 yang dilakukan oleh Fahd A rafiq dengan lampiran foto Fahd saat bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali yang membicarakan kongres bersama KNPI.

Haris menyebutkan adanya isu yang beredar bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menyediakan anggaran Rp 20 Miliar untuk kongres bersama ke 16 KNPI. Menurutnya, apabila itu benar, KPK, Badan

Pemeriksaan Keuangan dan Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

"Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar??? Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," tulis akun twitter @knpiharis dikutip Selasa (9/3).

Lebih dari 262 orang menyukai tulisan Haris dan beragam komentar soal Abu Janda pun meramaikannya.

"Aya aya wae gegara Abu Janda terpaksa negara habis banyak keluar uang?????.... Abu Janda memang dahsyat ternyata dia manusia mahalll?????" tulis @wahyu_abdi_.

"Abu janda dapet jabatan ini...????," cuit akun arie_hari-ansyah

Diketahui sebelumnya, Haris Pratama selaku Ketua KNPI merupakan pelapor Permadi Arya atau Abu Janda dalam kasus dugaan Rasis yang terjadi beberapa bulan lalu. Hingga saat ini, kasus tersebut belum diketahui prosesnya dan Haris pun dipecat dari Ketua Umum dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 6 Maret lalu. **han**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR

Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). Rapat Paripurna yang diikuti oleh 86 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 260 secara virtual tersebut beragendakan pembacaan pidato pembukaan masa persidangan yang disampaikan oleh Ketua DPR.

PENGAUKAN KADER DEMOKRAT

Dijanjikan Rp100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Hanya Rp5 Juta

Sejumlah peserta KLB Demokrat Deli-serdang protes karena uang yang diterima tak sesuai janji Rp100 juta. Peserta KLB yang protes dari Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara.

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kotamobagu, Gerald Piter Runtuthomas, mengaku diiming-imingi uang Rp 100 juta agar mengikuti kongres luar biasa yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan Gerald dalam video testimoni yang ditayangkan dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (8/3) yang ditayangkan melalui akun Youtube Agus Yudhoyono.

"Saya ikut karena diiming-imingi uang yang besar, Rp 100 juta. Yang pertama, kalau saya tiba di lokasi maka dapatkan 25 persen dari Rp 100 juta yaitu Rp 25.000.000, selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp 75 juta," kata Gerald dalam video tersebut.

"Tetapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp 5 juta," ujarnya.

Gerald menuturkan, sejumlah peserta KLB pun protes karena uang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Peserta KLB yang protes itu antara lain berasal dari Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara, termasuk dirinya.

Ia tidak terima hanya mendapat Rp 5.000.000 karena merasa telah berkorban dengan melawan ketua DPC di daerahnya untuk dapat hadir di KLB tersebut.

"Kami berontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipanggil dan ditambah uang Rp 5 juta oleh bapak M Nazaruddin," ujarnya.

Gerald pun menyampaikan permohonan maaf kepada ketua DPC, ketua DPD, dan AHY karena telah mengikuti KLB dengan iming-iming uang berjumlah besar.

Menanggapi itu, AHY memaafkan perbuatan Gerald seraya memaklumi pergolatan batin yang dialami Gerald ketika diiming-imingi uang untuk mengikuti KLB.

"Saya juga tidak membayangkan pasti bergemuruh rasa hatinya, di satu sisi sangat berat untuk berangkat ke Deli Serdang tapi di sisi lain mungkin dia punya kebutuhan. Nah, yang jahat itu siapa sekarang?" kata AHY.

Menurut AHY, testimoni tersebut menunjukkan adanya praktik politik yang tidak adil dan tidak etis.

"Kita tidak bisa lagi berkompetisi dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak sehat. Karena kompetisi yang tidak fair dan tidak sehat itulah

yang mengurungkan niat putra putri terbaik bangsa untuk masuk dalam gelanggang politik," ujar AHY.

Voting Kilat

Lebih lanjut Gerald mengungkapkan soal indikasi voting cepat dalam memilih Moeldoko. Hal ini yang dianggap janggal olehnya manakala pemilihan dilakukan dengan cara voting berdiri dan pimpinan sidang KLB Jhoni Allen Marbut tiba-tiba saja mengetuk palu tanda terpilihnya Moeldoko telah terpilih.

"Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini, secara voting. Ketika ditanya siapa yang akan dipercaya untuk menjadi Ketua, para peserta berteriak Pak Moeldoko. Ditanya lagi, siapa yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Alie," ucap Gerald.

Gerald menceritakan, Jhoni Allen saat itu berteriak ke para peserta KLB dan menanyakan siapa yang mendukung Moeldoko untuk menjadi ketua umum.

"Semua berdiri, angkat tangan ke atas. Ya, kita pilih Pak Moeldoko," ujar Gerald menirukan suara Jhoni Allen kala itu. Ia melanjutkan, Jhoni Allen kemudian bertanya kepada para peserta yang memilih Marzuki Alie sebagai ketua umum. Para peserta pendukung Marzuki Alie pun lantas langsung berdiri dan mengangkat tangan menandakan dukungannya.

"Tiba-tiba, Pak Jhoni Al-

len langsung mengetuk palu, bahwa yang terpilih Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa ini adalah Pak Moeldoko. Yang sementara Pak Moeldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB. Hanya ada Pak Marzuki Alie, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua," jelas Gerald.

Atas dasar voting kilat itu, ia menyimpulkan ada kejang-galan dalam pola pemilihan ketua umum.

Menurut Gerald, Moeldoko masuk menjadi anggota Demokrat saat KLB berlangsung. Hal itu baru diketahuinya ketika Jhoni Allen membacakan tata tertib KLB. Sepengetahuannya, Moeldoko menjadi anggota Demokrat dengan nomor khusus yang diberikan oleh kubu kontra-AHY.

"Ada di pasal 20 poin 5, anggota dan kader Demokrat yang dibuktikan dengan kartu tanda

anggota (KTA) Partai Demokrat dan atau kader yang baru masuk melalui KLB ini maka yang bersangkutan ditetapkan telah memiliki KTA Partai Demokrat dengan nomor khusus atau spesial," tuturnya.

Usai pembacaan tata tertib, Gerald mempertanyakan mengapa Moeldoko baru ditetapkan menjadi anggota saat KLB berlangsung. Kemudian ia bertanya-tanya siapa yang menandatangani KTA milik Moeldoko. Sebab, kata dia, KTA akan sah apabila ditandatangani oleh ketua umum.

"Kan harus ditandatangani Ketua Umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh Ketua Umum waktu itu masih Pak SBY. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Jadi KTA ini, ini KTA saya, ini ada Ketua Umum dengan Sekjen, Pak Hinc waktu itu," ujarnya. **han**

Nama-nama yang Muncul di Persidangan Korupsi Bansos Covid-19 akan Diusut KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut nama-nama yang muncul dalam persidangan kasus korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Kementerian Sosial (Kemensos) yang digelar pada Senin (8/3) kemarin.

"Terkait keterangan saksi tersebut, tentu tim JPU akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/3).

Ali mengatakan, KPK bakal melakukan analisa lebih lanjut dalam menyusun surat tuntutan untuk para terdakwa. "Kami mengajak masyarakat dapat terus mengikuti dan mengawasi persidangan yang terbuka untuk umum ini," kata Ali.

Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin kemarin, muncul nama-nama menentang yang disebut oleh saksi yang juga berstatus tersangka, yakni dua orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Nama-nama itu di antaranya, Politikus PDIP Ihsan Yunus Pengacara Kondang, Hotma Sitompul, Anggota BPK Ahsanul Qosasi serta Penyanyi Dangdut kondang Cita Citata.

Sekadar informasi, Presiden Direktur PT Tiga Pilar

Agro Harry Van Sidabukke dan konsultan hukum Ardiand Iskandar Maddanatajta didakwa menyuar mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliani Peter Batubara senilai Rp3,2 miliar. Suap itu disebut untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Jaksa menyebut Harry Van Sidabukke menyuar Juliani Batubara sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan Ardiand Iskandar, disebut Jaksa, menyuar Juliani senilai Rp1,95 miliar. Total suap yang diberikan kedua terdakwa kepada Juliani sejumlah Rp3,2 miliar.

Harry Sidabukke disebut mendapat proyek pengerjaan paket sembako sebanyak 1,5 juta melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamongan Sude. Sementara Ardiand, menyuar Juliani terkait penunjukkan perusahaannya sebagai salah satu vendor yang mengerjakan pendistribusian bansos corona.

Uang sebesar Rp3,2 miliar itu, menurut Jaksa, tak hanya dinikmati oleh Juliani Peter Batubara. Uang itu juga mengalir untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos Covid-19 di Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Kemensos, Adi Wahyono serta Matheus Joko Santoso. **han**



ZIARAH MAKAM WR SOEPRATMAN

Warga memainkan biola saat berziarah, di kompleks makam WR Soepratman di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/3). Kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilakukan oleh Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur di makam pencipta lagu Indonesia Raya tersebut dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional.

DPR Harapkan Dukungan untuk Bisa Sahkan RUU PKS

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, DPR mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk dapat mewujudkan adanya Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Pernyataan tersebut disampaikan saat mewakili Ketua DPR Puan Maharani yang berhalangan hadir dalam pidato pembukaan webinar pusat penelitian badan keahlihan Setjen DPR RI tentang PKS, Selasa (9/3).

"DPR mengharapkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari masyarakat, perorangan termasuk dari organisasi kemasyarakatan untuk bersama bergerak mewujudkan sebuah UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Indra dalam webinar yang dipantau melalui channel Youtube DPR.

Indra juga menegaskan komitmen DPR tetap mendukung pengesahan UU PKS. Hal tersebut, menurutnya dibuktikan dengan sikap DPR yang telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PKS ke dalam daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

"Dalam daftar tersebut, RUU tentang Penghapusan

Kekerasan Seksual atau RUU PKS tercantum pada urutan ke-15," ujarnya.

"Masuknya RUU PKS dalam prolegnas tahun ini menunjukkan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk mewujudkan sebuah UU yang dapat melindungi dan merehabilitasi korban kekerasan seksual serta mencegah terjadinya korban kekerasan seksual," katanya menambahkan.

Namun, ia menekankan bahwa UU merupakan produk politik yang mana bisa timbul berbagai faktor untuk menentukan pembahasannya.

Indra mengungkapkan, faktor tersebut ada yang datang dari internal yaitu DPR dan eksternal dalam hal ini pemerintah. "Banyak faktor dalam pembahasan UU, baik di internal DPR maupun faktor eksternal terutama dari pihak pemerintah," katanya.

Menurutnya, DPR memiliki alasan untuk mendukung adanya UU khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual (PKS). Baca juga: Bahas RUU PKS, Pemerintah Tunggu Surat Resmi DPR Alasannya adalah dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat melindungi dan merehabilitasi korban kekerasan seksual, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual. **mei**

Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak Lewat Call Center SAPA 129

JAKARTA (IM) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Layanan tersebut adalah akses bagi masyarakat untuk melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami sendiri.

Adanya akses layanan tersebut, Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap masyarakat terutama para korban tidak ada lagi takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. "Sudah seharusnya penyintas

atau pelapor diberikan kemudahan dalam mengajukan kasusnya sehingga bisa ditangani sesegera mungkin. Kami dorong para korban untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami," ujar Bintang pada Launching Layanan SAPA 129, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/3).

Bintang mengatakan, kehadiran call center SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Layanan tersebut bekerja

sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia) dan merupakan revitalisasi layanan pengaduan masyarakat Kemen PPPA untuk melindungi perempuan dan anak.

"Masyarakat, kementerian/lembaga atau unit layanan di daerah dapat melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami," kata Bintang.

Bintang mengatakan, mereka bisa melapor ke layanan SAPA 129 tersebut atau melalui WhatsApp di 08111-129-129. **han**



SAKASINASI COVID-19 BAGI PRAJURIT MABES TNI-AL

Sejumlah Prajurit TNI AL menunggu jadwal vaksinasi Covid-19 di GOR Mabas, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/3). Vaksinasi diberikan kepada 3.500 Prajurit dan PNS di lingkungan mabas TNI AL selama dua hari, sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19.

PENGUMUMAN

Urut memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT JAYATRINDO NUSA ABADI, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara (Perseroan) mengumumkan bahwa Perseroan akan mengambil alih sebagian besar saham PT SELLERA PRIMA LESTARINDO, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, secara langsung dari pemegang saham, kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pemberitahuan ini.

Apabila setelah lewat 14 hari, maka keberatan tidak dapat diterima.

Jakarta, 10 Maret 2021 -
Direksi
PT JAYATRINDO NUSA ABADI

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler (yang diambil di Luar Rapat) Para Pemegang Saham PT ASIAN ENGINEERING CONTRACTORS INDONESIA (dalam likuidasi) yang Sirkulernya dinyatakan dalam Akta Notaris nomor 4, Tanggal 04-03-2021 yang dibuat dihadapan Maria Gunarti SH, Mkn. Notaris di Jakarta Selatan, dinyatakan oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- Pemegang saham telah menerima baik Laporan pertanggung jawaban LIKUIDATOR dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Likuidator.
- Menyatakan proses Likuidasi telah selesai

Demikian Pengumuman ini guna memenuhi ketentuan UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Pembubaran.

Jakarta, 10 Maret 2021
PT. ASIAN ENGINEERING CONTRACTORS INDONESIA
LIKUIDATOR